

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024; serta
2. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Dr. Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 35 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
5. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
8. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
11. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
14. Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc. (Plh. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
15. Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc. (Plh. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
dan
19. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 serta Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023, sebesar **Rp7.539.915.254.000,00** (tujuh triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI dalam pagu indikatif tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp2.500.000.000.000,00** (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja Tahun Anggaran 2024, dalam rangka memenuhi target-target program yang belum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diantaranya target rehabilitasi mangrove, target rehabilitasi lahan kritis, target peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta target perhutanan sosial dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai progres penyusunan peraturan perundangan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, terutama mengenai tata cara perdagangan karbon untuk mendukung beroperasinya Bursa Karbon pada bulan September 2023.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kajian yang komprehensif guna mendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membekukan dan mencabut Perizinan Hutan Tanaman Rakyat di Pulau Lingga dan sekitarnya Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan proses penegakan hukum dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Kerja hari ini.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penindakan atas semua kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan yang berada di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, termasuk di dalam Taman Buru Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151